

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Cetakan ke-V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Dwiyanto, Agus, *Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2010).
- Fadillah, Putra, *New Public Governance* (Malang: UB Press, 2012).
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Firmansyah, Hamdan, *Prinsip, Asas, dan Unsur Pelaynan Publik*, (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022).
- HAW, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001).
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Indrajit, Richardus Eko, *E-Government In Action* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005).
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Beverly Hills: SAGE Publications, 1992).
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde, *Teknik Wawancara dan Observasi untuk Pengumpulan Bahan Informasi* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016).
- Qomar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negera Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Siswosoediro, Henry S., *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen: Panduan untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum* (Jakarta: Penerbit Visimedia, 2018).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sugiono, *Metode Penilaian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sudjana Nana dan Ibrahim, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Sinar Baru, 1989).

B. Artikel Jurnal

- Agusta, I, 'Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif', *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian Bogor*, 27.10 (2003).
- Eko Kurnia Putri dan Argo Pambudi, 'Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta', *Jurnal Natapraja*, 6.1 (2018).
- Hariyoko, Yusuf, 'Penguatan Digitalisasi Layanan Dokumen Kependudukan melalui PLAVON Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Wacana Kinerja*, 26.2 (2023).

- Laila Dwi Ningrum dan Nurbaiti, 'Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sibisa Online di Disdukcapil Kota Medan', *Jurnal Of Social Science Research*, 4.3 (2003).
- Nilamsari, Natalia, 'Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Wacana XIII*, 13.2 (2014).
- Shellya Salsabila, Aidinil Zetra, dan Roni Ekha Putera, 'Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9.2 (2021).
- Widyaningrum, Widdy Yuspita, 'Kajian Teoritis: Strategi Pengembangan E-Government dalam Pelayanan Administrasi Secara Daring', *Pakuan Justice Journal of Law*, 2.1 (2020).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Madya. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 274. Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali. Boyolali.

Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali No. 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 77 Tahun 2022. Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali. Boyolali.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Agustus 2010.

E. Hasil Penelitian

Ahmada, Bayu, 'Sistem Organisasi', (Makalah Penelitian, Institut Mathali'ul Falah, 2021).

Aprilia, Manisha, 'Pemanfaatan Sistem Daring dalam Efektivitas Pelayanan Akta Kelahiran Online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

Maelani, Alif, 'Konsep Pola Asuh Munif Chatib dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia' (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2015).

Rani Pratiwi Deasanti, 'Pelayanan Prima dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri' (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2010).

F. Internet

Baik Indonesia, "Usia Produktif Dominasi Penduduk Indonesia", <https://indonesiabaik.id/infografis/usia-produktif-dominasi-penduduk-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20%28BPS%29%2C%20jumlah%20penduduk,pada%20tahun%20lalu%20yang%20sebanyak%20272%2C68%20juta%20jiwa.,> diakses pada tanggal 7 November 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa) 2022-2023), <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzY2IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>, diakses 7 November 2024.

Diklat Pemerintah, "Etika Pemerintahan: Prinsip dan Penerapannya dalam Administrasi Publik", <https://diklatpemerintah.id/etika-pemerintahan-prinsip-dan-penerapannya-dalam-administrasi-publik/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, "Akta Kelahiran", <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", <http://www.ponorogo.go.id/>, diakses 12 Juli 2025.

Hukum Online, "Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97?page=3#!>, diakses pada tanggal 14 September 2024.

Ombudsman Republik Indonesia, "Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat", <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--layanan-publik-dan-kepuasan-masyarakat->, diakses pada tanggal 17 September 2024.

Ombudsman Republik Indonesia, "Memahami Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pelayanan Publik", <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahami-hak-dan-kewajiban-masyarakat-dalam-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.